

# LAPORAN

# KINERJA

*Tahun 2023*



**STASIUN KIPM BANDUNG**

**Tahun 2023**



BKIPM Bandung



@kipmbandung



Bkipm Bandung



kipm.bandung



Bkipm Bandung



[www.bkipm.kkp.go.id](http://www.bkipm.kkp.go.id)



[www.bkipm-bandung.info](http://www.bkipm-bandung.info)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHU UTARA CIMAHU JAWA BARAT  
TELEPON (022) 6649004, FAKSIMILE (022) 6649004  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

10 Januari 2024

Yth. Sekretaris BKIPM  
Cq. Ketua Tim Program  
di  
Jakarta

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: B.56/SKIPM.BDG/KP.732/I/2024

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2023	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan



Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Bandung selama Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Bandung Tahun 2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 10 Januari 2024



Kepala Stasiun KIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>EKSEKUTIF SUMMARY</b> .....	IV
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis .....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Sasaran.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja .....	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	10
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Analisis dan Evaluasi .....	14
3.3 Realisasi Anggaran .....	49
3.4 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	50
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Rekomendasi .....	52
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi .....	53
<b>LAMPIRAN</b> .....	54

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Bandung TA 2023 .....	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2023.....	11
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2023 .....	15
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 Tahun 2023.....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 Tahun 2023.....	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 Tahun 2023.....	21
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 Tahun 2023.....	21
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 Tahun 2023.....	23
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 Tahun 2023.....	24
Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 Tahun 2023 .....	26
Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 Tahun 2023.....	27
Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 Tahun 2023 .....	29
Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 Tahun 2023 .....	30
Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 Tahun 2023.....	31
Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 Tahun 2023 .....	32
Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 Tahun 2023 .....	33
Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 Tahun 2023 .....	35
Tabel 18 Target dan Realisasi IK16 Tahun 2023.....	36
Tabel 19 Target dan Realisasi IK17 Tahun 2023 .....	39
Tabel 20 Target dan Realisasi IK18 Tahun 2023 .....	41
Tabel 21 Target dan Realisasi IK19 Tahun 2023.....	41
Tabel 22 Target dan Realisasi IK20 Tahun 2023 .....	42
Tabel 23 Target dan Realisasi IK21 Tahun 2023 .....	44
Tabel 24 Target dan Realisasi IK22 Tahun 2023.....	46
Tabel 25 Target dan Realisasi IK23 Tahun 2023 .....	47
Tabel 26 Target dan Realisasi IK24 Tahun 2023 .....	48
Tabel 27 Target dan Realisasi IK25 Tahun 2023.....	49
Tabel 28 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023.....	49
Tabel 29 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

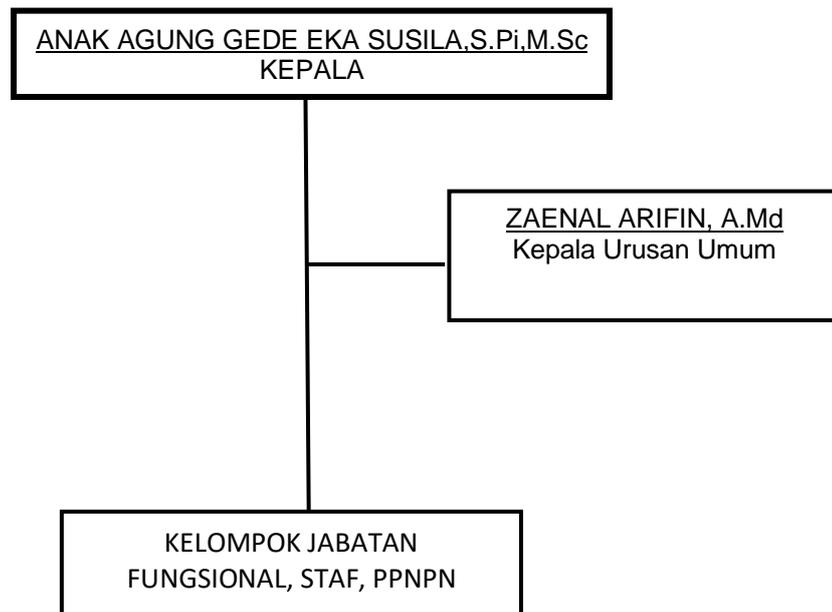
## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Bandung merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bandung menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati

ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 14 Orang Pejabat Fungsional PHPI, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 4 orang staf struktural, 1 Orang PPPK, 1 orang CPNS dan 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Struktur organisasi SKIPM Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1



**Gambar 1 Struktur Organisasi SKIPM Bandung**

### 1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Bandung

adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk

perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun KIPM Bandung Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

**BAB II.**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM Bandung tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

**Gambar 2 Peta Strategi BKIPM tahun 2023**



## 2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada awal Tahun 2023 Stasiun KIPM Bandung mempunyai indicator dan target kinerja sebanyak 24, namun pada bulan November 2023 ada perubahan Perjanjian Kinerja menjadi 25, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2023**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Bandung (%)	100
		3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan Lingkup SKIPM Bandung (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Bandung ( <b>lokasi</b> )	8
		5	Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa ( <b>Dokumen</b> )	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Bandung ( <b>lokasi</b> )	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Bandung (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Bandung ( <b>Unit</b> )	11
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan ( <b>sertifikat</b> )	2

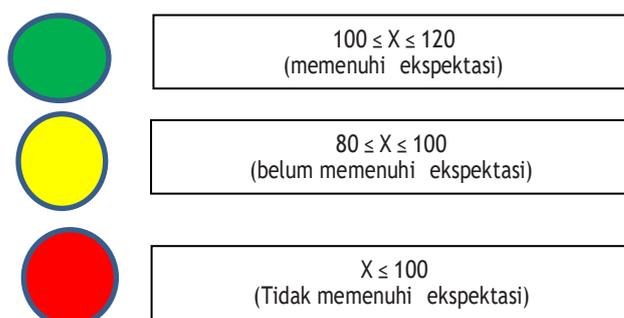
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik <b>(Lokasi)</b>	4
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability <b>(UPI)</b>	6
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI <b>(Produk)</b>	20
		14	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup SKIPM Bandung <b>(UPI)</b>	9
<b>Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	84
		16	Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi Lingkup SKIPM Bandung <b>(Parameter)</b>	3
<b>Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(Indeks)</b>	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	85
		19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Bandung <b>(%)</b>	100
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(%)</b>	75
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	93,75
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	82
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup SKIPM Bandung <b>(%)</b>	77,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Bandung <b>(%)</b>	77,5

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		25	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung (Nilai)	75

### 2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

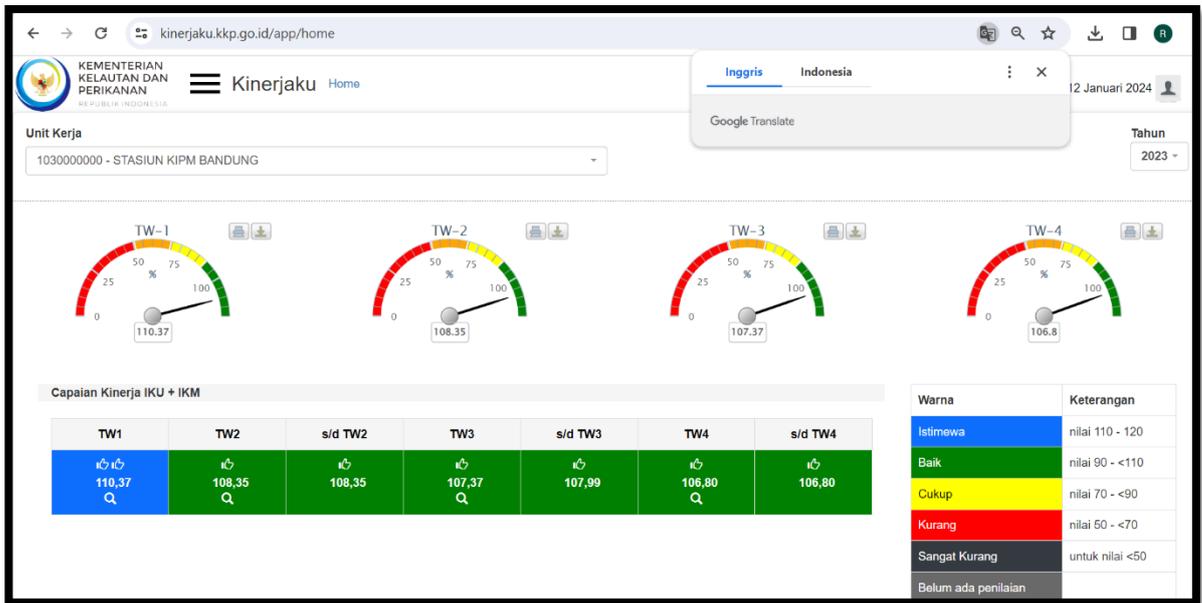
1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi *Maximize*  
Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:  
Indeks Capaian IKU =  $\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$
  - b. Polarisasi *Minimize*  
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:  
Indeks Capaian IKU =  $\{(1 + (1-\text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$
  - c. Polarisasi *Stabilize*  
Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Tahun 2023 adalah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,80 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



**Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK**

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Bandung pada Tahun 2023 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina (%)	98	100
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Bandung (%)	100	100
		3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai	100	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
			Ketentuan Perkarantinaan Ikan Lingkup SKIPM Bandung (%)		
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Bandung ( <b>lokasi</b> )	4	4
		5	Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa ( <b>Dokumen</b> )	1	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Bandung ( <b>lokasi</b> )	2	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Bandung (%)	92	100
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Bandung ( <b>Unit</b> )	11	14
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>					
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan ( <b>sertifikat</b> )	2	15
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik ( <b>Lokasi</b> )	4	4
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability ( <b>UPI</b> )	6	6
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI ( <b>Produk</b> )	20	19
		14	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil	9	9

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
			Perikanan Lingkup SKIPM Bandung <b>(UPI)</b>		
<b>Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>					
SK3.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	84	93,39
		16	Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi Lingkup SKIPM Bandung <b>(Parameter)</b>	3	4
<b>Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>					
SK4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(Indeks)</b>	84	92,26
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	85	97,70
		19	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Bandung <b>(%)</b>	100	100
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(%)</b>	75	100
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	93,75	96,34
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	82	85,40
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup SKIPM Bandung <b>(%)</b>	77,5	78,26
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Bandung <b>(%)</b>	77,5	99,46
		25	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup SKIPM Bandung <b>(Nilai)</b>	75	78,05

## 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

### *Kegiatan Karantina Ikan*

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Karantina Ikan berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif.

### ***Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif***

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Karantina Ikan) lingkup UPT SKIPM Bandung.

### **IK1. Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina**

Kontribusi BKIPM Bandung dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar persentasenya tidak kurang dari 98%. Dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi, berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara mitra berdasarkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah 28 negara anggota Uni Eropa, 5 negara anggota EEU (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), Korea Selatan, China, Kanada, dan Vietnam dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ekspor yang dilakukan.

Kasus penolakan ekspor hasil perikanan ke negara mitra yang terjadi selama tahun 2023 masih dapat dikendalikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penolakan yang terjadi, dilihat dari Jumlah HC Ekspor yang diterbitkan

sama jumlah dengan HC Ekspor yang tidak tertolak, selama tahun 2023 HC Ekspor sebesar 2.047 HC dan yang tidak tertolak sebesar 2.047 juga, Sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 100 % atau 102,04% dari target. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 indikator ini sama antara target dan realisasinya yaitu tahun 2022 dengan target 98 % Realisasi 100 % atau sama dengan periode sekarang, yang membedakan dari jumlah HC yang dikeluarkan, pada tahun 2022 sebanyak 1.733 HC.

Berdasarkan realiasi tahunan Pusat Karantina Ikan indicator ini tercapai sebesar 99,84 maka Stasiun KIPM Bandung menyumbang nilai positif dengan realisasi 100%.

Kegiatan pendukung dalam pencapaian indicator ini antara lain :

- Melakukan pemeriksaan penyakit ikan
- Melakukan analisis hasil pengamatan / pemeriksanaan HPI /HPIK tingkat Lapangan
- Melakukan evaluasi metode pengendalian HPI/HPIK dan pengkaijan/uji coba metode pengamatan atau Tindakan karantina di lapangan

Capaian ini tidak lepas efisiensi sumberdaya yang digunakan, yaitu menggunakan teknologi sistem informasiberupa platform aplikasi Sister Karoline (Sistem Informasi Teritegrasi Karantina Ikan dan Mutu Online) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://ppk.bkipm.id/>.

Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hamper disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan Sister Karoline selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan tindakan karantina ikan dan mutu yang dilakukan dalam proses sertifikasi karantina ikan dan mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestic serta informasi kegiatan inspeksi.

**Tabel 3 Target dan Realisasi IK 1 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina	-	-	100	100	100	98 %	100 %	102,04	100	100

## **IK2. Persentase Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona**

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 80/2015 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi. Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor 80/2015.

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka capaiannya sama 100 %, begitu juga bila dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 sudah terpenuhi 100%, sama dengan capaian Pusat Karantina Ikan sebesar 100%.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indicator ini antara lain :

- Melakukan pengawasan PIK yang dicegah penyebarannya secara domestic
- Melakukan pemeriksaan penyakit ikan melalui pengamatan / pemeriksanaan secara laboratoris

**Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

### **IK3. Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai Ketentuan Perakarntinaan Ikan**

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Indikator persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan penanganan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI, dengan rumusan:

$$X = \frac{A+B}{2}$$

Ket :

A = prosentase penanganan impor yang masuk ke wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan  
dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah importaksi yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total importaksi}} \times 100\%$$

B = prosentase impor yang bebas penyakit ikan karantina dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{((KID12 + KID7 + (KID11 \text{ dakatau } KID13))}{\text{Jumlah PPK impor}} \times 100\%$$

*Jumlah PPK impor*

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 dapat dinyatakan sebesar 100%. Capaian indicator ini dilihat dari tidak adanya jenis PIK hasil pemeriksaan dari produk yang diimpor. Dibandingkan tahun 2022 indikator ini, terealisasi sebesar 100 %, yang membedakan hanya jumlah HC yang dikeluarkan. Realisasi indikator ini sama dengan capaian pusat BKIPM yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indicator ini adalah pengawasan dan pengawalan Impor oleh petugas Karantina Ikan Stasiun KIPM Bandung pada lokasi unit usaha dengan melakukan pemeriksaan dokumen, pengamatan dan

pemeriksaan laboratorium.

**Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase ikan dan hasil perikanan impor yang bebas penyakit Ikan karantina lingkup UPT SKIPM Bandung	-	100	100	100	100%	100 %	100 %	100	95	105,27

#### **IK4. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi**

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah serangkaian pemeriksaan sistematis suatu populasi ikan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan bertujuan mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota. Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dihitung dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada tahun berjalan di seluruh wilayah kerja BKIPM Bandung. Pada tahun 2023, Stasiun KIPM Bandung menargetkan 8 lokasi, dan terealisasi 8 lokasi yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan pemantauan PIK mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM No. 65/KEP- BKIPM/2021 tentang pedoman pemantauan Penyakit Ikan Karantina. Pengambilan contoh uji dan penentuan lokasi target pemantauan berbasis kompartemen seperti unit pembenihan, pembesaran, unit penampungan, dan penjualan ikan yang diutamakan pada kawasan atau sentra perikanan budidaya/industrialisasi perikanan budidaya lainnya baik perikanan tawar, payau maupun laut. Dengan mempertimbangkan pula keberadaan kampung budidaya perikanan di setiap wilayah tujuan pemantau PIK sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN-KP/ 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 288/DJPB.S2/TU.210/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022 Pengambilan contoh uji

dimaksudkan sebagai Quality Assurance (QA) pada media pembawa kampung budidaya dan ditambah media pembawa dominan/khas pada wilayah tersebut. Sebanyak 8 (delapan) jenis media pembawa menjadi target pengambilan contoh uji meliputi: 1) Nila (*Oreochromis niloticus*), 2) Mas (*Cyprinus carpio*), 3) Lele (*Clarias sp.*), 4) Koi (*Cyprinus carpio*), 5) Nilem (*Osteochilus vittatus*), 6) Gurame (*Osphronemus goramy*), 7) Patin (*Pangasius sp.*), 8) ikan/udang hias (Udang hias/Blue velvet, *Corydoras panda*, *Corydoras albino*, Yellowtail aceri, Nicaraguin)

Adapun media pembawa contoh uji disetiap lokasi: 1) Kota Bandung: lele (*Clarias sp.*), mas (*Cyprinus carpio*), nila (*Oreochromis niloticus*), koi (*Cyprinus carpio*), udang hias (blue velvet) dan ikan hias (Yellowtail aceri dan Nicaraguin); 2) Kabupaten Bandung: lele (*Clarias sp.*), mas (*Cyprinus carpio*), nila (*Oreochromis niloticus*), dan ikan hias (*Corydoras panda* dan *Corydoras albino*); 3) Kabupaten Bandung Barat: lele (*Clarias sp.*), mas (*Cyprinus carpio*), nila (*Oreochromis niloticus*), patin (*Pangasius sp.*); 4. Kabupaten Tasikmalaya ada kampung nila: nila (*Oreochromis niloticus*), nilem (*Osteochilus vittatus*), gurame (*Osphronemus gouramy*); 5) Kabupaten Garut ada kampung mas: mas (*Cyprinus carpio*), nila (*Oreochromis niloticus*), nilem (*Osteochilus vittatus*); 6) Kabupaten Cianjur ada kampung lele: lele (*Clarias sp.*), koi (*Cyprinus carpio*), nila (*Oreochromis niloticus*); 7) Kabupaten Sukabumi ada kampung nila: nila (*Oreochromis niloticus*), lele (*Clarias sp.*), koi (*Cyprinus carpio*), mas (*Cyprinus carpio*); 8) Kabupaten Subang ada kampung mas: mas (*Cyprinus carpio*), nila (*Oreochromis niloticus*).

Pengambilan contoh uji dilakukan secara acak, dengan prevalensi 15% dan berbasis kawasan. Tim melengkapi informasi dengan mengisi kuisioner, melakukan pengukuran kualitas air meliputi suhu, pH, DO, nitrit, nitrat dan ammonia. Lokasi pengambilan contoh juga dilengkapi dengan data titik koordinat menggunakan Global Positioning System (GPS) untuk ketertelusuran lokasi dan dokumentasi kondisi di lokasi serta dokumentasi media pembawa.

Target pemeriksaan contoh uji sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Ada sebanyak 16 (enam belas) jenis penyakit yang menjadi parameter uji meliputi 1) *Myxobolus cerebralis*, 2) *Aeromonas salmonicida*, 3) *Edwardsiella ictaluri*, 4) *Yersinia ruckery*,

5) *Streptococcus innae*, 6) *Streptococcus agalactiae*, 7) Koi Herpes Virus (KHV), 8) Spring Viremia Carp (SVC), 9) Carp Edema Virus (CEV), 10) Tilapia-like Virus (TiLV), 11) Viral Nervous Necrotic (VNN), 12) Megalocytivirus, 13) White Spot Syndrome Virus (WSSV), 14) Taura Syndrome Virus (TSV), 15) Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV), 16) Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS).

Pemeriksaan untuk target uji parasit (*Myxobolus cerebralis*) dilakukan secara mikroskopis sesuai instruksi kerja metode yang sudah ada di Laboratorium SKIPM Bandung dan diperoleh hasil negatif. Adapun pemeriksaan untuk parasit non target ditemukan 12 jenis parasit yang termasuk kelompok parasit patogen obligat seperti *Ichthyophthirius multifiliis* maupun kelompok parasit patogen fakultatif (oportunistik) seperti *Trichodina* sp. dan *Dactylogyrus* sp.

Pemeriksaan contoh uji target bakterial menggunakan metode konvensional biokimia, mengikuti instruksi kerja metode uji yang sudah ada di Laboratorium Stasiun KIPM Bandung dan diperoleh hasil negatif. Pada pemeriksaan lanjutan terhadap bakteri non target ditemukan 19 spesies bakteri. Bakteri yang paling banyak ditemukan dari semua sampel yaitu kelompok *Aeromonas* sp., *Pseudomonas* sp., dan *Citrobacter freundii*.

Pemeriksaan untuk target uji jamur (*Aphanomyces invadans*) menggunakan metode PCR, mengikuti instruksi kerja metode uji yang sudah ada di Laboratorium Stasiun KIPM Bandung dan diperoleh hasil negatif.

Pemeriksaan untuk target virus menggunakan metode PCR, mengikuti instruksi kerja metode uji yang sudah ada di Laboratorium Stasiun KIPM Bandung dan diperoleh positif untuk parameter TiLV pada media pembawa nila dari Kabupaten Tasikmalaya (pemantauan PIK periode I); positif CEV pada media pembawa koi dan mas dari kabupaten Sukabumi serta media pembawa mas dari Kabupaten Bandung (pemantauan PIK periode II). Sedangkan untuk pengujian virus lainnya diperoleh hasil negatif. Semua sampel positif sudah dilakukan uji banding ke Laboratorium acuan BUSKIPM dan diperoleh hasil yang sama yaitu positif TiLV dan CEV.

Berdasarkan data sekunder dan data umum kualitas air, kondisi lingkungan budidaya masih dalam ambang batas normal dan memadai untuk kehidupan dan

pertumbuhan ikan dalam kegiatan budidaya. Sedangkan hasil pemeriksaan parasit dan bakterial nontarget diperoleh hasil jenis-jenis parasit perairan yang biasa muncul pada kondisi lingkungan kurang seimbang. Sedangkan hasil bakteri ditemukan tiga macam kelompok bakteri yaitu 1) bakteri perairan umum air tawar yang patogen, 2) bakteri heterotroph sebagai simbol pencemaran/kelimpahan bahan organik dan 3) bakteri kelompok enterobacter (intestinalis) yang menunjukkan adanya pencemaran limbah manusia atau hewan ternak.

Pada Tahun 2023 telah terealisasi 8 lokasi dari target 8 lokasi yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sama terealisasi 8 lokasi juga dari target yang sama. Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah tercapai 100 % dari target 8, namun apabila dibandingkan dengan capaian Pusat Karantina Ikan pada tahun 2023, SKIPM Bandung untuk capaian indicator ini hanya menyumbang 3% dari realisasi sebanyak 266 lokasi.

Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi antara SKIPM Bandung dengan Dinas KP Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan.

**Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Lokasi sebaran penyakit karantina ikan yang teridentifikasi	-	-	-	-	8	8	8	100	8	100

#### **IK5. Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa**

Definisi dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Bandung sebagai berikut.

1. Mitigasi Risiko lalu lintas media pembawa adalah upaya sistematis terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko pada kegiatan importasi dan lalu lintas media pembawa HPIK/HPIK; 2. Dokumen Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berupa Draft NSPK dan Kebijakan terkait Mitigasi Risiko serta laporan investigasi penyakit ikan pada kegiatan lalu

lintas; 3. Media Pembawa HPIK adalah ikan, produk ikan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPIK; 4. Investigasi HPIK/HPI tertentu pada kegiatan lalu lintas adalah kegiatan penelusuran pada kejadian outbreak/wabah penyakit dan hasil positif penyakit ikan pada kegiatan pemantauan penyakit HPIK, monitoring dan survailan penyakit ikan dan lalu lintas media pembawa.

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2023 dengan target tahunan 1 dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen pada Tahun 2023.

**Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa	-	-	-	-	-	1	1	100	-	-

#### **IK6. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina**

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran

tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{a} \times 100$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100$$

X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X1 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X2 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X3 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

X4 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang \*tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Capaian indicator ini pada tahun 2023 sebesar 100 %, karena berdasarkan hasil pengawasan tidak ada jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan. Capaian ini bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2021 capaiannya sama yaitu 100%.

Bila dibandingkan dengan capaian Pusat karantina Ikan, capaian indicator ini di SKIPM Bandung menyumbang 100%, yang mana capaian Pusat karantina Ikan sebesar 99,82%.

Kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain :

- Melakukan kegiatan Identifikasi / Analisis potensi pemasukan dan pengeluaran Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi, dan di Batasi

- Melakukan kegiatan Pelepasliaran Ikan
- Melakukan kegiatan Rapat Teknis Operasional Perkarantinaan Ikan
- Melakukan kegiatan Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agensi Hayati, Jenis Asing invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dan Pakan di Dalam Wilayah NKRI
- Melakukan kegiatan Pengawasan dan/atau Pengendalian Pengeluaran PIK, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dari Wilayah NKRI
- Menyediakan Bahan Laboratorium

**Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Persentase Pencegahan Impor, Ekspor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	100	100	100	100	100%	90 %	100 %	111,11	95	105,26

### **IK7. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi**

Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Penyebaran dan penggunaan baik secara sengaja maupun tidak dapat berakibat kerugian baik ekonomi maupun ekologi. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan yang bertujuan menginventarisasi agen hayati pada suatu wilayah perairan Indonesia untuk mengetahui sebaran agen hayati yang tergolong dilindungi, dilarang maupun yang bersifat invasif. Indikatornya dilihat dengan jumlah lokasi perairan Indonesia (danau/waduk/rawa/sungai/anak sungai) di wilayah kerja UPT BKIPM yang dipantau dan dipetakan.

Pada Tahun 2023 Indikator ini mempunyai target 2 yang direncanakan di Kab Bandung dan Kota Bandung, dan pada tahun 2023 telah terealisasi 100% atau 2 lokasi yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung., apabila dibandingkan dengan tahun 2022 indikator ini terealisasi lebih rendah, yang mana target dan realisasi tahun 2022 sebesar 3 lokasi.

Apabila dibandingkan dengan Target pada Renstra 2020-2024 telah terealisasi 66 %, yang mana target Renstra sebesar 3 lokasi, namun apabila dibandingkan dengan capaian Pusat Karantina Ikan tahun 2023, SKIPM Bandung telah menyumbang 2,83 % dari capaian keseluruhan 106 lokasi.

Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator ini adalah Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif (JABI) Tahun 2023 yang bertujuan untuk memperoleh peta sebaran jenis ikan yang bersifat invasif (JABI), menginventarisir jenis ikan invasif yang dilarang diperjualbelikan di Wilayah kerja Stasiun KIPM Bandung.

**Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi	-	-	-	-	3	2	2	100	3	66

#### **IK8. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend)

kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi penghitungan:

$$\% \text{ kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Selama tahun 2023, tidak terjadi Kasus pelanggaran perakarantinaan dan keamanan hayati ikan sehingga capainnya 100 % dengan perhitungan

$$\% \text{ kasus} = \frac{2 + 0}{2} \times 100\%$$

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2021 capainya sama sebesar 100%, dan apabila dibandingkan dengan capaian pusat BKIPM lebih besar, dimana capaian indikator ini di tingkat pusat atau BKIPM sebesar 99,53% dari target 92%. Sedangkan apabila dinandingkan dengan target pada Renstra capaian ini sudah sama yaitu sebesar 100%.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- Pengamatan, pencarian, pengumpulan bahan keterangan
- Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam rangka tindakan karantina ikan di pintu pemasukan dan pengeluaran
- Temu Teknis dan Bimtek Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan
- Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan
- Koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan

**Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan	-	-	100	100	100	92	100	108,7	100	100

## **IK9. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity**

Instalasi karantina ikan (IKI) merupakan tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada di dalamnya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan. Tindakan karantina ikan bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara RI. IKI dibangun oleh kementerian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media seperti pelabuhan laut, bandara, kantor pos serta tempat-tempat lain yang dipandang perlu seperti sentra kegiatan perikanan. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan.

Pada tahun 2023 target Jumlah Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity sebanyak 14 unit yaitu CV Serayu Koi Indonesia, Kakang Betha, PT. Guna Tropikalindo Abadi, Combiphar, PT Oco haus, PT Tongwei Indonesia, Aquazone Indonesia, Leopard, Kurnia Mitra Makmur Pertiwi, PT. Duta Ratu Pertiwi Lancar, CV. Altamira, PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia, CV Wica Dharma dan PT. Suri Tani Pemuka

Apabila Dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan target, pada tahun 2022 dengan target 9 unit, terealisasi sama 14 Unit. Dan apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 sudah mencapai 70 % dari terget 20 unit.

Keberhasilan indicator ini menyumbang sebesar 1,58% dari capaian pusat sebesar 888 unit.

Kegiatan untuk mendukung tercapainya indicator ini antara lain :

- Melakukan penilaian kelayakan instansi karantina ikan kepada unit usaha secara rutin
- Melakukan inspeksi dan verifikasi hasil penilaian kelayakan IKI
- Melakukan Surveillance penerapan CKIB di IKI

**Tabel 11** Target dan Realisasi IK9 pada tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Verifikasi pada Unit Usaha Perikanan (UUP) yang memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	-	-	-	-	14	11	14	120	20	70

### ***Kegiatan Pengendalian Mutu***

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

### ***Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif***

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Bandung

### **IK10. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan**

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Pada Tahun 2023 telah terealisasi 15 Unit dari target 2 Unit yaitu Supplier Hendar, Nurjanah, Tubagus Yunus, Wahyu, Otong Herman, Supomo, H. Deni, Aman Yusman, Hendrawan, Dadang Hermawan, KMMP, Rudi, Ibong, Ade Tarini dan Dadi, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang mana pada Tahun 2022 hanya terealisasi 3 unit. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 telah terealisasi diatas 120 % dari target 3, dan apabila dibandingkan dengan capaian Pusat Pengendalian Mutu, SKIPM Bandung untuk indicator ini hanya menyumbang sebesar 3,7 % dari capaian 403 Sertifikat.

**Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					TW III Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	-	-	-	-	3	2	15	120	3	120

### **IK11. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik**

Dalam rangka mendukung Intruksi Presiden Nomor 01 tahun 2017 tentang

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban tugas untuk 1) meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan 2) mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan

Untuk mengimplementasikan inpres dimaksud terkait mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk perikanan, dengan harapan produk perikanan yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2023 Indikator ini ditargetkan sebanyak 4 lokasi dan telah tercapai 4 Lokasi yaitu :

No	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		KAB/KOTA	LOKASI
1	TW 1	KOTA CIMAH	Pasar Tradisional Cimindi dan Pasar Modern Yogya Plaza Cimahi
2		PPN PELABUHAN RATU	TPI Pelabuhan Ratu Sukabumi
3	TW 3	KAB BANDUNG	Pasar Bale Endah dan PIM
4		KOTA BANDUNG	Pasar Ikan Ps Baru dan Superindo Dago

Bila dibandingkan dengan tahun 2022, sama-sama terealisasi 4 lokasi, dengan target yang sama. Capaian indikator ini telah menyumbang 4 lokasi atau 4,4 % dari capaian pusat sebanyak 91 lokasi, dan telah memenuhi target dari Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 4 lokasi.

Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi antara SKIPM Bandung dengan Dinas KP Kabupaten/Kota, BPPOM dan instansi terkait lainnya. Melalui kegiatan monitoring pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat serta sosialisasi terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan baik di pasar modern, pasar tradisional, pelabuhan pendaratan ikan dan supplier.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, carapengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;
- b. Pengambilan contoh dalam rangkapengendalian mutu hasil perikanan dilakukakan setiap 3 (tiga) bulan untukmasing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
  - Pengujian kesegaran ikan(organoleptik);
  - Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella danparameter lain apabila dibutuhkan);
  - Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

**Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan II Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Triwulan II					TW III 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	-	-	2	4	3	4	4	100	4	100

### **IK12. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability**

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability

melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada tahun 2023 target jumlah UPI yang menerapkan system Traceability sebanyak 6 unit dan pada Tahun 2023 telah tercapai 6 Unit yaitu : UKM Risyah, PT. Bahari Pratama Mandiri, KMMP, CV. Mitra Ratu Mandiri, PT. Brata Adi Laksana dan Ika Food Putra Mas. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, hanya terealisasi 4 unit.

Berdasarkan realisasi keseluruhan UPT, dari target 250 tercapai 258, maka Stasiun KIPM Bandung menyumbang capaian sebanyak 6 unit atau sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 6 unit atau sebesar 2,33 % dari capaian pusat. Dan apabila melihat dari target Renstra tahun 2020-2024 telah terpenuhi 60 % dari target 10 Unit.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indikator ini antara lain; melakukan penerapan sistem traceability di UPI dan melaksanakan bimtek traceability bagi inspektur mutu.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan traceability hanya dilakukan oleh 5 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu atau sebesar 20,8% dari total pegawai SKIPM Bandung sebanyak 24 orang.

**Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	-	-	-	2	4	6	6	100	10	60

### **IK13. Ruang lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP)**

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan

ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan 20 sertifikat Produk, dan terealisasi 19 Sertifikat produk, yaitu :

NO	TW	JUMLAH	SERTIFIKAT HACCP	
			PRODUK	NAMA PERUSAHAAN
1	I	5	Frozen damersal fish	PT. Bahari Pratama mandiri
			Frozen chephalopods	
			Frozen Tuna	
			Fresh Tuna	
			Frozen damersal fish	CV. Mitra Ratu Mandiri
2	II	8	Frozen damersal fish	CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar
			Frozen chephalopods	
			Frozen Shrimp	
			Frozen Pelagic Fish	
			crab Crackers	PT. Cempaka Hirina Snack
			Fish Crackers	
			Prawn Crackers	
			Squid Crackers	
3	III	1	Frozen Farm raised Fish	PT. Kurnia Mitra makmur Purwakarta
4	IV	5	frozen Milkfish	PT.Global Pangan Sadulur
			Shrimp paste	PT Ikafood Putramas
			Fish Snack	PT. Brata Adi Laksana
			Frozen breaded Fish	PT. Kurnia Mitra Makmur
			Frozen Pelagic Fish	

Capain indicator ini sebesar 95% dari target 20 Ruang lingkup produk, dan sebanding sama dengan capaian pada renstra 2020-204, namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2022 terealisasi 18 ada peningkatan sebanyak 1 ruang lingkup, dan pada tahun 2021 tercapai 15 dari target 9. Namun capaian indicator ini apabila dibandingkan dengan capaian pusat hanya menyumbang sebesar 2,7% dari capaian pusat sebanyak 701, dan telah

tercapai 95 % dari target Renstra 2020-2024 sebanyak 20 Ruang lingkup. Kegagalan capaian ini tidak mencapai 100% dikarenakan adanya UPI yang tutup operasional.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indikator ini antara lain; Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan melakukan Bimtek Pengendali Mutu Hasil Perikanan.

Selain hal tersebut, capaian 95 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 5 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu atau sebesar 20,8% dari total pegawai SKIPM Bandung sebanyak 24 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas dari efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link <http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/>. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir di semua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilan.

**Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	TAHUN					TW III 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Ruang lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP)	-	-	-	15	18	20	19	95	20	95

#### **IK14. UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten

menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 9 unit, dan telah terealisasi 9 unit dan terealisasi 9 unit yaitu CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar, PT. IKA Food Putra Mas, CV. CV. Mitra Ratu Mandiri, PT Kurnia Mitra Makmur Purwakarta, PT. Brata Adi Laksana, UKM Risyad, dan PT Bahari Pratama Mandiri. Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi Tahun 2022 yaitu sama terealisasi 9 UPI juga.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

**Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi tahun					Tahun			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	-	-	-	-	9	9	9	100	14	64,3

### ***Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan***

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

### ***Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif***

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Bandung

#### **IK15. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Indikator ini pada Tahun 2023 dengan target nilai sebesar 84, dan tereliasi sebesar 93,39 (sangat baik).

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang hanya 90,04, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sekitar 3,34.

Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dari Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan, Nilai SKM Stasiun KIPM Bandung berada di urutan 20, dari 47 UPT. Nilai tertinggi Stasiun KIPM Bengkulu dengan Nilai 98,28.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

**Tabel 17 Target dan Realisasi IK15 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Triwulan II 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik	-	-	-	-	90,04	84	93,39	111,18	-	-

**IK16. Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT KIPM Bandung**

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Bandung selaku UPT BKIPM yaitu mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah negara RI, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu, diperlukan Laboratorium yang bersertifikat SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu negara mitra semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance). Dalam rangka meningkatkan kepercayaan Negara mitra tersebut maka Laboratorium Uji Stasiun KIPM Bandung terus mengembakan kualitas pelayanannya, salah satunya dengan menambah ruang lingkup parameter uji. Laboratorium pengujian Stasiun KIPM Bandung harus mampu menjamin mutu hasil pengujian secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap 14 ruang lingkup pengujiannya.

Pada Tahun 2023 Target indikator ini adalah 3 Parameter, dan telah terealisasi 4 Parameter, yaitu :

NO	PARAMETER	PARAMETER
1	4 PARAMETER	Pengujian SVC dengan PCR sesuai SNI
		Pengujian TSV dengan PCR sesuai SNI
		Pengujian ALT dengan PCR sesuai SNI 2332.3:2015
		Pengujian Formalin dengan Test Kit (colorimetri)

Bila dibandingkan dengan realisasi penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di laboratorium UPT BKIPM sampai triwulan 4 tahun 2023

tercapai sebanyak 36 parameter dari 14 UPT KIPM, maka SKIPM Bandung telah menyumbang 11,11% dari capaian pusat.

**Tabel 18 Target dan Realisasi IK16 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%		
Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT KIPM Bandung	-	-	-	-	-	3	4	120	-	-

### ***Kegiatan Sekretariat BKIPM***

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM.

### ***Sasaran Strategis 4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM***

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Bandung

### **IK17. Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015 – 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik

sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut

$$IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta S1) + Koef(1 - inDiscpl)$$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP  $\delta S1$  : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen

dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidaktersediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk mengitung indek profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa

digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggaran semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Tahun 2022 target 84 dan terealisasi 92,26, bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi, pada tahun 2021 terealisasi 82,38 dan tahun 2020 sebesar 87,62, dan capaian indikator ini terhadap target Renstra 2020-2024 sebesar 104,84 % dari target 88.

Berdasarkan aplikasi IP ASN KKP, Capaian IP ASN KKP sebesar 88,20, bila dibandingkan IP ASN Stasiun KIPM Bandung masih lebih besar daripada Capaian IP ASN KKP yaitu sebesar 92,26.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target indikator ini adalah : menginput sertifikat diklat semua pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga nilai kompetensi bisa meningkat, menginput SKP Tahun 2022 dengan baik pada aplikasi SKP KKP, disiplin dalam bekerja sehingga meminimalisir terkena hukuman disiplin.

**Tabel 19 Target dan Realisasi IK17 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	87,62	82,38	84	92,26	109,83	88	104,84

### **IK18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2023 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 86 dan terealisasi sebesar 97,70, bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi yang mana pada tahun 2022 terealisasi 96,31 pada tahun 2021 terealisasi 81,74.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPMHKP Nomor B.48/BPPMHKP.1/RC.610/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Kinerja TA 2023 lingkup BPPMHKP, Capaian Indikator ini Stasiun KIPM Bandung menempati urutan ke 6 dengan nilai 97,70 dari 51 Satker, sedangkan peringkat terbaik didapat oleh Balai BPPMHKP Surabaya I dengan nilai 98,15.

Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 mencapai 111 % dari target renstra sebesar 88.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain :

- Penyusunan dokumen kinerja mulai dari Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi
- Kesesuaian dokumen kinerja yang telah disusun sesuai dengan yang diinput di aplikasi kinerjajaku
- Pemenuhan dokumen kinerja telah dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan.

**Tabel 20 Target dan Realisasi IK18 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Triwulan III 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Kinerja Rekonsiliasi	-	-	-	81,74	96,32	86	97,70	113,60	88	111

### **IK19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 100 % dengan realisasi 100 %.

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1635/ITJ.0/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, bahwa temuan BPK atas BKIPM dengan nilai 0 Rupiah, sehingga secara keseluruhan temuan BPK atas BKIPM 100%, sehingga capaian UPT otomatis mengikuti capaian BKIPM. Keberhasilan capaian indicator ini didukung dengan tertibnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 21 Target dan Realisasi IK19 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Triwulan III					Triwulan III 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
<b>Persentase Penyelesaian Temuan BPK</b>	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

### **IK20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem

pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 75 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa SKIPM Bandung pada Tahun 2023 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 indikator telah menuntaskan 80 % perbaikan, masih ada 2 temuan yang harus segera ditindaklanjuti. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indicator ini mengalami stagnan nilai yaitu sama 80, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 95,12 % dari target 85%, sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian BKIPM, capaian SKIPM Bandung lebih baik, yang mana capaian BKIPM sebesar 93,73 % dari target 75%

**Tabel 22 Target dan Realisasi IK20 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	-	-	80	80	75	100	120	85	120

### IK21. Nilai IKPA

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 89, namun ada perubahan target pada triwulan 4 menjadi 93,75, dengan realisasi sebesar 96,34. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan, pada tahun

2022 terealisasi sebesar 97,24 dan dibandingkan dengan capaian BKIPM lebih tinggi dimana capaian BKIPM sebesar 95,85 dari target 93,75. Dan apabila dibandingkan dengan capaian KKP lebih besar yang mana capaian KKP hanya sebesar 91,99.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA antara lain :

- Melakukan review DIPA pertriwulan serta meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan penyerapan anggaran berubah di akhir triwulan
- Melakukan review anggaran tiap bulan untuk memastikan pelaksanaan pencairan anggaran sesuai dengan RPD yang sudah dibuat serta menyelaraskan Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi anggaran yang diserap dan target penyerapan anggaran triwulan yang akan datang. Kemudian mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan pada sepuluh hari kerja pertama setiap triwulan.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan, terjadwal sesuai RPD dan target penyerapan anggaran dan kegiatan pertriwulan, perjenis belanja yang telah ditetapkan. Serta melakukan percepatan belanja khususnya belanja barang baik berupa belanja bahan, persediaan, barang operasional/non operasional maupun belanja perjalanan dinas. Yang tidak terkendala AA, Refokusing dan Juknis
- Mengidentifikasi dan mempersiapkan Pengadaan Barang Jasa pada tahun anggaran 2023 dan memastikan pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus serta menyampaikan data kontrak belanja barang dan modal tepat waktu dengan nilai dibawah Rp50 juta. Dan kontraktual dibawah 200juta, agar pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan I. dan Persiapan pelaksanaan Fisik Barang Jasa pada Triwulan II untuk nilai 200juta ke atas
- melakukan pembayaran dengan menyampaikan SPM Langsung Kontraktual tepat waktu paling lambat 17 hari kerja dari tanggal berita acara serah terima atau berita acara pembayaran pekerjaan
- menghitung kembali kebutuhan operasional Rutin bulanan satker dalam

menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien sehingga pertanggungjawaban UP dan TUP dapat tepat waktu serta maksimal tanpa adanya setoran pengembalian dana TUP ke kas negara. Serta Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detail data IKPA UP/TUP).

- melakukan pemantauan progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan menetapkan mitigasi resiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran
- melakukan proses penginputan dan pelaporan capaian output, antara lain menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin tepat waktu paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output yang memiliki karakteristik beragam. Melakukan percepatan kegiatan sesuai target capaian RO triwulan I dan II sesuai target PCRO yang diproyeksikan sama dengan target penyerapan anggaran triwulanan I dan II dalam DIPA. Selalu memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi

**Tabel 23 Target dan Realisasi IK21 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai IKPA	-	-	-	95,26	97,24	93,75	96,34	102,76	-	-

### IK22. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011, dihitung dengan menggunakan formula :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

**P** : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

**K** : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

**PK** : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

**E** : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pada Tahun 2023 mengalami revisi target dari 86 menjadi 82, dan terelisasi 85,40. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan target yaitu 81, dan realisasi sebesar 83,70. Apabila dibandingkan dengan capaian BKIPM, capaian SKIPM Bandung lebih kecil atau sebesar 85,40 % dari capaian BKIPM sebesar 90,65, dan 93 % dari target Renstra 2020-2024 sebesar 90.

Stasiun KIPM Bandung telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah rutinitas peninjauan capaian output dan anggaran pada aplikasi DJA Smart.

**Tabel 24 Target dan Realisasi IK22 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi tahun					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Kinerja Anggaran		-	-	87,08	83,70	82	85,40	104,15	90	94,89

### **IK23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2023 target indicator ini sebesar 77,5 dan terealisasi 78,26. Apabila dibandingkan dengan capaian BKIPM sebesar 85,16, maka capaian indicator SKIPM Bandung lebih kecil atau sebesar 97,90 %, sedangkan apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 97,83 % dari target nilai 80. Indikator ini tercapai diatas target dikarenakan adanya kegiatan yang mendukung antara lain :

- Penyusunan Manajemen Resiko PBJ pada awal tahun 2023
- Penyusunan dokumen perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2023 oleh PPK maupun PBJ
- Penginputan RUP Tahun 2023 tepat waktu dan sesuai
- PBJ dan PPK telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang masih harus dilengkapi adalah proses pengadaan barang dan jasa Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2024 harus sudah memperbanyak menggunakan aplikasi SPSE, sehingga akan meningkatkan nilainya.

**Tabel 25 Target dan Realisasi IK23 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	76,21	77,5	78,26	100,98	80	97,83

### **IK24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2017-2022 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2022, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya belum ada. Pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan sebesar 77,5 dengan realisasi 99,46. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BKIPM Nomor : B. 33/BPPMHKP.1/PL.760/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, maka Stasiun KIPM Bandung menempati urutan ke 4 dengan nilai 99,46% dari 51 Satker, dan yang paling tertinggi adalah Balai KIPM Jakarta II dengan nilai 97,36%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2022-2024 tercapai 120 % yang mana targetnya 80, namun apabila dibandingkan capaian BKIPM di tahun 2023 sebesar hanya 99,46%, yang mana capaian BKIPM sebesar 100%

Indikator ini mencapai realisasi diatas target dikarenakan pemenuhan dokumen parameter yang terpenuhi 100%.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah :

- Penatalaksana Barang Stasiun KIPM Bandung sudah melakukan rekonsiliasi BMN semester 1 dan 2 tahun 2023
- Penatalaksana Barang Stasiun KIPM Bandung telah menyusun Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2023, dan sudah membuat laporan tingkat

pemanfaatan BMN dengan baik dan tepat

- Penatalaksana Barang sudah melakukan Inventarisasi BMN sejak Tahun 2018-2022 dan sudah dilakukan penilaian Kembali
- Penatalaksana Barang Stasiun KIPM Bandung sudah Menyusun Laporan BMN Tahun 2023 baik semseteran maupun tahunan secara tepat waktu

**Tabel 26 Target dan Realisasi IK24 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi TW III					TW III 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	-	-	-	-	100	77,5	99,46	120	80	120

### **IK25. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk mendapatkan predikat WBK**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP.

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$

Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Akumulasi status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai  $\geq 75$  dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan MenPAN-RB serta memperoleh Piagam Penghargaan

Pada Tahun 2023, Stasiun KIPM Bandung masuk dalam unit kerja yang dinilai Pembangunan ZI nya dan telah dilakukan penilaian oleh itjen IV dan Itjen V. target nilai minimal yang harus didapat adalah 75, pada tahun 2023 Stasiun KIPM Bandung

mendapatkan nilai 78,05.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah pemenuhan dokumen dan Reform dari semua area, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, tercapainya indikator ini merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa kolaborasi semua pegawai dengan jumlah pegawai yang hanya 24 Orang ASN dan 13 Orang PPNPN.

**Tabel 27 Target dan Realisasi IK25 pada Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Realisasi TW III					TW III 2023			Renstra2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	75	78,05	104		

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah sebesar Rp. 6.917.987.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.782.843.350 atau sebesar 98.05 % Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Bandung T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 27 dan Tabel 28.

**Tabel 28. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023**

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	396.000.000	394.798.895	99,70
2	3989	Pengendalian Mutu	431.000.000	412.757.017	95,77
3	3988	Karantina Ikan	382.940.000	333.816.100	87,17
4	3987	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5.708.047.000	5.641.471.338	98,83
		<b>TOTAL</b>	<b>6.917.987.000</b>	<b>6.782.843.350</b>	<b>98,05</b>

**Tabel 29. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Tahun 2023**

	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Belanja Pegawai	3.214.301.000	3.191.244.088	99,28
2	Belanja Barang	3.578.280.000	3.467.106.662	96,89
3	Belanja Modal	125.406.000	124.492.600	99,27
	<b>TOTAL</b>	<b>6.917.987.000</b>	<b>6.782.843.350</b>	<b>98,05</b>

### 3.4 EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CAK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CAK_i)} \times 100\%$$

*E* = Efisiensi  
*PAK<sub>i</sub>* = Pagu anggaran keluaran *i*  
*RAK<sub>i</sub>* = Realisasi anggaran keluaran *i*  
*CAK<sub>i</sub>* = Capaian keluaran *i*

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

*NE* = Nilai Efisiensi  
*E* = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran



Stasiun KIPM Bandung pada Tahun 2023 sebesar 2,87% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Stasiun KIPM Bandung sebesar 57,17% dari skala maksimal 100%.

Hal ini disebabkan kurangnya konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, yang menyebabkan nilai efisiensi tidak maksimal sebesar 100% dari skala maksimal 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Tahun 2023 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2023, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I sebesar 110,37, Triwulan II sebesar 108,35, Triwulan III sebesar 107,99 dan Triwulan IV sebesar 106,80, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 25 Indikator Kinerja terdapat 15 (60%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 9 (36 %) Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target, dan sebanyak 1 (4 %) yang realisasinya di bawah target.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 1 Indikator yaitu Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI yang realisasinya di bawah target hal ini disebabkan karena adanya UPI yang telah tutup proses produksinya dan beberapa tidak melakukan perpanjangan sertifikat HACCP.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Dengan adanya perubahan organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, tentunya akan menghambat terhadap penetapan kinerja dan ada beberapa IKU yang fungsinya terkait dengan Karantina Ikan akan hilang dan IKU baru pasti akan focus ke pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk itu perlu adanya strategi dalam penentuan Perjanjian Kinerja mengingat penetapan organisasi baru akan membutuhkan waktu yang tidak cepat.

- Sertifikat HACCP merupakan IKU yang fungsinya ada di mutu, mengingat tahun 2023 target HACCP tidak tercapai target, maka tahun 2024 perlu adanya penyesuaian target yang disesuaikan dengan UPI yang masih aktif pada tahun 2024 dengan menyusun jadwal yang tepat dan mengoptimalkan personil yang menangani mutu.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Indikator Kinerja yang nilai capaiannya melebihi 120%, agar dapat disesuaikan targetnya pada tahun 2024, yaitu :
  - Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Bandung
  - Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan
  - Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT KIPM Bandung
  - Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Bandung
  - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Bandung

#### **4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA**

**Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Triwulan III Tahun 2023, yaitu :**

1. Setiap penanggung jawab IKU telah Menyusun bukti dukung dengan Baik dalam bentuk File PDF.
2. Telah dilakukan Koordinasi dengan penanggung jawab IKU terkait dengan persiapan verifikasi capaian kinerja
3. Dokumen Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja telah di publikasikan melalui web Site PPID Stasiun KIPM Bandung
4. Penanggung Jawab IKU telah melakukan evaluasi terakait pelaksanaan kegiatan Sertifikasi HACCP pada tahun 2023 dan akan menyesuaikan target dengan keberadaan UPI pada tahun 2024.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung tahun 2023 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Tahun 2023.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2023 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Bandung dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Bandung terdiri dari 4 Sasaran Strategis (SS) dan 24 Indikator, namun pada triwulan IV ada revisi Target Kinerja menjadi 25 Indikator.

Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Tahun 2023. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Bandung pada Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina capaiannya 102,04%, dari yang ditargetkan sebesar 98% terealisasi 100%.
- b. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Bandung capaiannya 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100%;

- c. Presentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan Lingkup SKIPM Bandung capaiannya 100%, dari yang ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100%
- d. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi capaiannya 100%, dari yang ditargetkan 8 lokasi terealisasi 8 lokasi.
- e. Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Media Pembawa, terealisasi 100% dari target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen
- f. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina capaiannya 111,1%, dari yang ditargetkan sebesar 90% terealisasi 100%;
- g. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi capaiannya 100 %, dari target 2 lokasi dan terealisasi 2 lokasi.
- h. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Bandung capaiannya 108,70%, dari yang ditargetkan sebesar 92% terealisasi 100%;
- i. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung capaiannya 120 %, dari yang ditargetkan sebesar 11 unit terealisasi 14 unit;

2. Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan, terealisasi 120 % dari target 2 sertifikat, terealisasi 15 sertifikat.
- b. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability, target 6 unit, realisasi 6 unit sehingga capaian 100%;
- c. Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP, target 20 sertifikat dan realisasi 19 sertifikat, capaiannya 95%;
- d. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, target 9 unit, realisasi 9 unit sehingga capaian 100%;

3. Sasaran strategis 3 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IKU untuk SS juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Bandung, realisasi adalah 93,39 dari target 84 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian IKK adalah 111,18;
- b. Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT KIPM Bandung, realisasi 120% dari target 3 parameter terealisasi 4 parameter.

4. Sasaran Strategis 4 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT SKIPM Bandung, terealisasi 109,83% dari target 84 terealisasi 92,26;
- b. Nilai Rekonsiliasi Kinerja, terealisasi 114,94%, dari target nilai 86 terealisasi 97,70;
- c. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Bandung, terealisasi 100%;
- d. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 75%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 120%;
- e. Nilai IKPA SKIPM Bandung terealisasi 102,76%, dari target nilai 93,75 terealisasi 96,34
- f. Nilai kinerja anggaran SKIPM Bandung, terealisasi 104,15% dari target nilai 82 terealisasi 85,40
- g. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa terealisasi 100,08 %, dari target 77,50% terealisasi 78,26%
- h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN terealisasi 120% dari target 77,50% terealisasi 99,46 %
- i. Nilai Minimal yang di Persyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Wilayah dari Bebas Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung terealisasi 104,07% dari target nilai 75 terealisasi 78,05

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Tahun 2023 dengan sasaran strategis sebanyak 4 sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin

ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) EMAIL [setban.bkipm@kkp.go.id](mailto:setban.bkipm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Anak Agung Gede Eka Susila**  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  
Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan

**Ishartini**

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Karantina Ikan  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Bandung

**Anak Agung Gede Eka Susila**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Bandung (%)	100
		3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaaan Ikan Lingkup SKIPM Bandung (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Bandung ( <b>lokasi</b> )	8
		5	Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa ( <b>Dokumen</b> )	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Bandung ( <b>lokasi</b> )	2
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup SKIPM Bandung (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Bandung ( <b>Unit</b> )	11
<b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b>				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan ( <b>sertifikat</b> )	2
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik ( <b>Lokasi</b> )	4
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability ( <b>UPI</b> )	6

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup SKIPM Bandung (UPI)	9
		14	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI (Produk)	20
<b>Kegiatan 3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK3.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	15	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di SKIPM Bandung (Nilai)	84
		16	Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi Lingkup SKIPM Bandung (Parameter)	3
<b>Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	17	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT SKIPM Bandung (Indeks)	84
		18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Bandung (Nilai)	85
		19	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	100
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	75
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	93,75
		22	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	82
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup SKIPM Bandung (%)	77,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Bandung (%)	77,5
		25	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup SKIPM Bandung (Nilai)	75

## DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	431.000.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	382.940.000,-
	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	396.000.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.708.047.000,-
<b>Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Tahun 2023</b>		<b>6.917.987.000,-</b>

Jakarta, 7 November 2023

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung



Anak Agung Gede Eka Susila

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK1. Efektivitas sertifikasi ekspor Ikan dan hasil perikanan yang Memenuhi persyaratan karantina

No	Bulan	Jumlah Sertifikat			
		Jumlah Sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan untuk Eskport	Frekuensi Ekspor	frekuensi penolakan oleh negara tujuan ekspor
1	JAN	159	159	159	0
2	FEB	148	148	148	0
3	MAR	164	164	164	0
4	APR	140	140	140	0
5	MEI	180	180	180	0
6	JUN	142	142	142	0
7	JUL	176	176	176	0
8	AGUS	174	174	174	0
9	SEPT	185	185	185	0
10	OKT	201	201	201	0
11	NOV	180	180	180	0
12	DES	198	198	198	0
	<b>TOTAL</b>	<b>2,047</b>	<b>2,047</b>	<b>2,047</b>	<b>0</b>

**Formula:**

$$x = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$A = \frac{2047}{2047} \times 100\% = 100$$

$$B = \frac{2047}{2047} \times 100\% = 100$$

JADI

$$\text{Persentase} = \frac{100 + 100}{2} = 100\%$$



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

DATA HC DOMESTIK ANTAR ZONA			
NO	BULAN	JUMLAH LALULINTAS	
		DOMESTIK KELUAR	DOMESTIK MASUK
1	JAN	40	1
2	FEB	54	3
3	MAR	46	2
4	APR	18	2
5	MEI	56	1
6	JUN	36	2
7	JUL	41	1
8	AGUST	41	4
9	SEPT	28	0
10	OKT	36	3
11	NOV	35	0
12	DES	35	0
JUMLAH		466	19

%Cegah= ((A-B)/A) x 100%

A: Jenis PIK yang sudah ada di Indonesia

B: Jenis PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Tidak ada jenis PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc



Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi,M.Si

**DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

**IK 3. Presentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan Lingkup SKIPM Bandung**

DATA IMPOR

No	Bulan	Jumlah Sertifikat				JUMLAH IMPOR	
		KID12	KID7	KID11/KI D13	JUMLAH PPK IMPOR	JUMLAH IMPOR YANG MEMENUHI SYARAT	JUMLAH TOTAL IMPOR
1	JAN	1				1	1
2	FEB	2				2	2
3	MAR	2				2	2
4	APR	2				2	2
5	MEI	3				3	3
6	JUN	4				4	4
7	JUL	1				1	1
8	AGUST	0				0	0
9	SEPT	0				0	0
10	OKT	0				0	0
11	NOV	2				2	2
12	DES	4				4	4
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

**Formula:**

$$X = \frac{A+B}{2}$$

Ket :

A = prosentase penanganan impor yang masuk ke wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah importaksi yang memekuhi syarat}}{\text{Jumlah total importaksi}} \times 100\%$$

B = prosentase impor yang bebas penyakit ikan karantina dihitung menggunakan rumus :

$$\frac{((KID12 + KID7 + (KID11 \text{ dakatau } KID13))}{\text{Jumlah PPK impor}} \times 100\%$$

$$A = \frac{21}{21} \times 100\% = 100$$

$$X = \frac{100+100}{2} = 100$$

$$B = \frac{21}{21} \times 100\% = 100$$



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

—



## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 4.Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi

### DATA LOKASI SEBARAN PENYAKIT IKAN YANG SUDAH TERIDENTIFIKASI

No	LOKASI
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Tasikmalaya
3	Kabupaten Garut
4	Kota Bandung
5	Kabupaten Sukabumi
6	Kabupaten Bandung Barat
7	Kabupaten Cianjur
8	Kabupaten Subang



Mengetahui

Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024

Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si



**DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

IK 5. Dokumen Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Investigasi HPIK/HPI Tertentu Pada Lalu Lintas Me

**TEREALISASI 1 DOKUMEN**



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si



**DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

IK 6. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

No	TAHUN	JUMLAH IKAN YANG DIBATASI DAN DILARANG (PERMEN 19 TAHUN 2020)	JUMLAH YANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN
1	2023	75	0
	<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>0</b>

<b>Formula:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:  <math display="block">\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%</math> </li> <li>Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:  <math display="block">X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%</math> </li> <li><b>Keterangan:</b></li> </ul>	
X	pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X1	pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X2	pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X3	pencegahan domestic masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X4	pencegahan domestic keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
A	Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
B	jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Pencegahan Impor  $\frac{(75-0)}{75} \times 100\% = 100\%$

Pencegahan Ekspor  $\frac{(75-0)}{75} \times 100\% = 100\%$

Pencegahan Domas  $\frac{(75-0)}{75} \times 100\% = 100\%$

Pencegahan Dokel  $\frac{(75-0)}{75} \times 100\% = 100\%$

$X = \frac{(100 + 100 + 100 + 100)}{4} \times 100\% = 100\%$



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

**DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

IK 7.Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Bandung

No	LOKASI
1	Kota Bandung
2	Kabupaten Bandung



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si



## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK8. Presentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Bandung

### LAPORAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PERKARANTINAAN

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW3	TW4
1	PENANGANAN KASUS	100	100	100	100

### PADA TRIWULAN IV TAHUN 2023, TIDAK ADA KASUS



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si

**DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

IK9.Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Bandung

**JUMLAH SERTIFIKAT IKI/CKIB  
STASIUN KIPM BANDUNG TRIWULAN IV TAHUN 2023**

SERTIFIKAT IKI/CKIB

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW3	TW4	TOTAL
1	UNIT	2	3	4	5	14

- 1 CV Serayu Koi Indonesia
- 2 Kakang Betha
- 3 Combiphar
- 4 PT. Duta Ratu Pertiwi Lancar
- 5 PT. Tongwei Indonesia
- 6 Aquazone Indonesia
- 7 Leopard
- 8 Kurnia Mitra Makmur Pertiwi
- 9 PT. Oco Haus
- 10 PT. Suri Tani Pemuka
- 11 CV. Wica Dharma
- 12 CV. Altamira
- 13 PT. Guna Tropikalindo Abadi
- 14 PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia

Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung



Anak Agung Sete Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK10. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW3	TW4
1	Jumlah Sertifikat CPIB		4	3	8

1 SUPLIER HENDAR

2 SUPLIER NURJANAH

3 SUPLIER TUBAGUS TUNUS

4 SUPLIER WAHYU

5 SUPLIER OTONG ROHMAN

6 SUPLIER SUPONO

7 SUPLIER H DENI

8 SUPLIER AMAN YUSMAN

9 SUPLIER HENDRAWAN

10 SUPLIER DADANG HERMAWAN

11 SUPLIER KMMP

12 SUPLIER RUDI

13 SUPLIER IBONG

14 SUPLIER ADE TARINI

15 SUPLIER DADI



Mengetahui

Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024

Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 11 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik

### DATA KEGIATAN

No	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		KAB/KOTA	LOKASI
1	TW 1	KOTA CIMAH	Pasar Tradisional Cimindi dan Pasar Modern Yogya Plaza Cimahi
2		PPN PELABUHAN RATU	TPI Pelabuhan Ratu Sukabumi
3	TW 3	KAB BANDUNG	Pasar Bale Endah dan PIM
4		KOTA BANDUNG	Pasar Ikan Ps Baru dan Superindo Dago



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 8 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK12. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

### LAPORAN TRACEABILITY STASIUN KIPM BANDUNG 2023

#### PELAKU USAHA YANG MENERAPKAN TRACEABILITY

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	TRIWULAN 4	6	UKM RISYA, KMMP, PT. BAHARI PRATAMA MANDIRI, CV MITRA RATU MANDIRI, PT. BRATA ADI LAKSANA, PT. IKA FOOD PUTRA MAS



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK13. Ruang Lingkup Produk yang Dijamin melalui Sertifikat HACCP  
PENERBITAN HACCP TRIWULAN IV TAHUN 2023

NO	TW	JUMLAH			
			PRODUK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	I	5	Frozen damersal fish	PT. Bahari Pratama mandiri	
			Frozen chephalopods		
			Frozen Tuna		
			Fresh Tuna		
			Frozen damersal fish	CV. Mitra Ratu Mandiri	
2	II	8	Frozen damersal fish	CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar	
			Frozen chephalopods		
			Frozen Shrimp		
			Frozen Pelagic Fish		
			crab Crackers	PT. Cempaka Hirina Snack	
			Fish Crackers		
			Prawn Crackers		
			Squid Crackers		
3	III	1	Frozen Farm raised Fish	PT. Kurnia Mitra makmur Purwakarta	
4	IV	5	frozen Milkfish	PT.Global Pangan Sadulur	
			Shrimp paste	PT Ikafood Putramas	
			Fish Snack	PT. Brata Adi Laksana	
			Frozen breaded Fish	PT. Kurnia Mitra Makmur	
			Frozen Pelagic Fish		



Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Hari Haryanto, S.St.Pi,M.Si

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 14. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

### DATA UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

NO	TW	JUMLAH	NAMA UPI
1	TW 1	2	CV. Duta Ratu Pertiwi Lancar
			PT Ika Food Putramas
2	TW 2	2	CV. Mitra Ratu Mandiri
			PT. Kurnia Mitra Makmur Purwakarta
3	TW 3	3	PT. Brata Adi Laksana
			UKM Risya
			PT Bahari Pratama Mandiri
4	TW 4	2	PT. Global Pangan Sedulur
			Cempaka Hirina Snack



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi. Hari Haryanto, S.St.Pi, M.Si

Cimahi, 8 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Haryanto', is written over the printed name 'Hari Haryanto'.

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 15. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di SKIPM Bandung

NO	PELAKSANAAN
	TW IV
1	93,39



Mengotahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

drh. Tsani Ismi Isdaryah

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 16. Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi

NO	PELAKSANAAN	PARAMETER
1	4 PARAMETER	Pengujian SVC dengan PCR sesuai SNI
		Pengujian TSV dengan PCR sesuai SNI
		Pengujian ALT dengan PCR sesuai SNI 2332.3:2015
		Pengujian Formalin dengan Test Kit (colorimetri)



Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

drh. Tsani Ismi Isdaryah

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 17. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Bandung

### REALISASI CAPAIAN NILAI IP ASN

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW3	TW4
1	NILAI IP ASN	Belum ada target	76.3	Tidak ada target	92,26



Mengetahui  
Kepala UPT SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Bandung (Nilai)

NO	URAIAN	KET
1	Nilai Rekonsiasi Kinerja	97,70



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md



## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Bandung

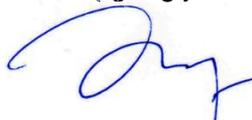
NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Realisasi	100%



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU



Zaenal Arifin, A. Md

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

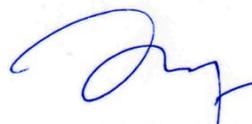
IK20. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	100

Berdasarkan Aplikasi dari Itjen (SIDAK), Terealisasi bandung 100 % dari target 75 %

Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung  
  
Anak Agung Zede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

  
Zaenal Arifin, A.Mc

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK22. Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)

NO	URAIAN	TRIWULAN IV 2023
1	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	85,40



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 21. Nilai IKPA UPT SKIPM Bandung

### REALISASI CAPAIAN NILAI IKPA

NO	URAIAN	TW 1	TW 2	TW3	TW4
1	REALISASI NILAI IKPA		95.38	Tidak ada target	96,32



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

  
Zaenal Arifin, A. Md



## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

### REALISASI TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	Tahun 2023
1	REALISASI	78,26



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A. Md

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 24. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

### REALISASI TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1	REALISASI	99,46



Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 3 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

IK 25. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup SKIPM Bandung

NO	URAIAN	TAHUN 2023
1	REALISASI	78,05

Mengetahui  
Kepala SKIPM Bandung



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 10 Januari 2024  
Penanggung jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md